

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI TERHADAP
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA PT BPR
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)**



PUBLIKASI ILMIAH

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi Strata I pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Disusun Oleh:

ADYTIA DIO NUR KUSUMA

NIM : C100130271

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

PROSES PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI TERHADAP

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA PT BPR

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

ADYTIA DIO NUR KUSUMA

C100130271

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Nuswardhani, S.H., S.U.)

HALAMAN PENGESAHAN

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI TERHADAP
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA PT BPR**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)

Yang ditulis oleh:

ADYTIA DIO NUR KUSUMA

C100130271

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada: Jumat, 4 Agustus 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua : Nuswardhani, S.H., S.U.
Sekretarsi : Septarina Budiwati, S.H., M.H.
Anggota : Darsono, S.H., M.Hum.

()
()
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H)

PROSES PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI TERHADAP
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA PT BPR
(Studi kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)

ABSTRAK

Bank dalam memberikan kredit harus memperhatikan jaminan pemberi kredit, dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah atau debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dengan adanya keyakinan tersebut, bank berharap banyak agar kredit diberikan kepada nasabah atau debitur tidak menjadi kredit yang macet (bermasalah) dikemudian hari. Oleh karena itu, sebelum memberi kredit, bank harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah atau debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan perjanjian. Untuk dapat dikatakan bahwa nasabah atau peminjam selaku debitur melakukan wanprestasi, terlebih dahulu di sini pihak kreditur memberi peringatan atau somasi kepada debitur agar melunasi pembayaran kreditnya. Kemudian jika somasi yang pertama tidak dihiraukan lalu kreditur memberi somasi lagi kepada debitur, dan Apabila pihak debitur tetap tidak melaksanakan pembayaran perjanjian kredit tersebut, maka pihak kreditur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri atas dasar wanprestasi. Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a) Untuk mengetahui proses pemeriksaan perkara wanprestasi terhadap pelaksanaan perjanjian kredit pada PT BPR; b) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian pada perkara wanprestasi dalam perjanjian kredit pada PT BPR; c) Untuk mengetahui hakim dalam menentukan putusan atas perkara wanprestasi tersebut. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode normative yaitu mengkaji hukum berdasarkan kaidah hukum dan asas dalam hukum. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa a) Proses pemeriksaan perkara wanprestasi terhadap pelaksanaan perjanjian kredit pada PT BPR ialah majelis hakim memeriksa segala alat bukti berupa dokumen dan keterangan saksi yang diajukan penggugat; b) Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian pada perkara wanprestasi dalam perjanjian kredit pada PT BPR dengan melihat alat bukti yang diajukan penggugat berupa dokumen dan keterangan saksi; c) Hakim dalam menentukan putusan atas perkara wanprestasi tersebut yang telah terbukti dengan melihat segala bukti-bukti yang diajukan penggugat dan juga karena ketidakhadiran pihak tergugat maka hakim memutuskan putusan verstek.

Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Wanprestasi, Proses Penyelesaian Perkara

ABSTRACT

The bank in giving credit must pay attention the guarante, its meaning is ability of costumer or debtor pay off obligation which in promised. Such beliefs make the bank expect a lot for credit given to the client is not jammed. therefore prior to crediting the bank must have confidence and in depth analysis of the costumers intention and ability to pay off debt or return the financing as agreed. The costumer can be said to break the prrommise, the creditor give a sum to settle his credit payment. The if the first one ignored, then the creditor gives the second, if the second is not responded then the creditor can file the lawsuit to the state court on the basis of a broken promise. The purpose of this study is to know a) the process of examination of cases of default against credit agreements at PT. BPR; b) To know the judge's consideration in determining the proof of the case of default in the credit agreement at PT. BPR; c) to know the judge in determining the decision on the breach of

wanprestasi. This research method using normative approach that is studying law based on rule and law principle. Result of research and discussion show that a) the process of examination of cases of default against credit agreements at PT. BPR is the panel judges examination all evidence and documents, statements of the witnesses presented by the plaintiff b) the judge's consideration in determining the proof of the case of default in the credit agreement at PT. BPR by looking at the evidence presented by the plaintiff in the form of documents and witness statements; c) the judge in determining the decision on the breach of wanprestasi which has been proven by looking at all the evidence presented by the plaintiff and also because the absence of the defendant, the judge decides the verdict of verstek.

Keyword: credit agreement, wanprestasi, legal settlement process.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka bertambah meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi, yang para pelakunya meliputi Pemerintah maupun masyarakat sebagai orang-perseorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang sangat besar, sehingga dengan meningkatnya kegiatan pembangunan tersebut, maka meningkat pula keperluan akan tersedianya dana yang sebagian besar diperoleh melalui perkreditan.

Kegiatan pinjam-meminjam uang atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit dalam praktek kehidupan sehari-hari bukanlah merupakan sesuatu yang asing lagi, bahkan istilah kredit ini tidak hanya dikenal oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga sampai pada masyarakat di pedesaan. Kredit umumnya berfungsi untuk memperlancar suatu kegiatan usaha, dan khususnya bagi kegiatan perekonomian di Indonesia sangat berperan penting dalam kedudukannya, baik untuk usaha produksi maupun usaha swasta yang dikembangkan secara mandiri karena bertujuan meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat.

Pengertian perjanjian kredit berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *contract credit*. Dalam hukum Inggris, perjanjian kredit bank termasuk *loan of money*¹. Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam instruksi pemerintah dan berbagai surat edaran, antara lain,²

¹H. Salim, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal. 157.

²*Ibid.*,

Pengertian perjanjian kredit berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *contract credit*. Dalam hukum Inggris, perjanjian kredit bank termasuk *loan of money*³. Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam instruksi pemerintah dan berbagai surat edaran, antara lain;⁴

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut dilaksanakan dengan mana para pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam melaksanakan perjanjian kredit yang mana pihak debitur menerima sejumlah uang dari pihak kreditur dan pihak kreditur akan menerima pembayaran atas hutang debitur dengan jumlah yang sama dengan bunga pada waktu yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Pihak debitur diberikan kredit oleh pihak kreditur didasarkan atas dasar kepercayaan bahwa pihak debitur akan melunasi hutangnya tepat pada waktunya. Jadi apabila debitur telah mengembalikan apa yang diperjanjikan maka kreditur juga berkewajiban menyerahkan jaminan kredit yang diberikan oleh debitur.⁵

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁶

Menurut teori baru, perjanjian antara nasabah dengan bank dalam melakukan kredit tidak hanya dilihat semata-mata tetapi harus dilihat pembuatan sebelumnya atau yang mendahulunya. Ada tahapan pembuatan perjanjian.⁷

Bank dalam memberikan kredit harus memperhatikan jaminan pemberi kredit, dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah atau debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dengan adanya keyakinan tersebut, bank berharap banyak agar kredit diberikan kepada nasabah atau debitur tidak menjadi kredit yang macet (bermasalah) dikemudian hari. Oleh karena itu, sebelum memberi kredit, bank harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah atau debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan perjanjian.

³H. Salim, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal. 157.

⁴*Ibid.*,

⁵Djumhana Muhamad, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung, hal. 385.

⁶Sukwiaty, et. al., 2007, *Ekonomi 3*, Edisi 2. Jilid 3, Jakarta, Yudhistira, hal. 63.

⁷ Salim, H.S, 2005, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 16.

Dalam kenyataan, kredit yang diberikan oleh pihak perbankan khususnya PT. BPR ARTA MAS SURAKARTA tersebut, sebagian besar tidak dapat dikembalikan secara utuh oleh nasabah atau debiturnya, yang membawa resiko usaha bagi pihak perbankan yang bersangkutan, akhirnya menimbulkan kredit- kredit macet (WANPRESTASI). Dikatakan wanprestasi karena debitur tidak dapat memenuhi apa yang telah diperjanjikan seperti dalam perjanjian kredit No. 7720 / SPK / XI / 2010 yaitu dimana debitur harus melunasi hutangnya dalam jangka waktu pinjaman 6 bulan dan membayar tiap bulan senilai Rp. 2.500.000,- tetapi debitur hanya melakukan 2 kali pembayaran dan sampai tanggal jatuh tempo tidak ada itikad baik dari debitur untuk melakukan pembayaran ataupun melunasi hutangnya kepada kreditur dengan alasan tidak memiliki uang untuk membayarnya. Kredit macet ini merupakan suatu fenomena social dan yang dihadapi dunia perbankan kita. Oleh karena itu, bank dalam memberikan kredit harus melakukannya berdasarkan analisis pemberian kredit yang memadai, agar kredit yang diberikan oleh bank itu adalah kredit yang tidak mudah menjadi kredit macet.

Permasalahan yang diteliti yaitu; 1) Bagaimana proses pemeriksaan perkara dalam perkara wanprestasi terhadap pelaksanaan perjanjian kredit pada PT BPR?; 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian pada perkara wanprestasi dalam perjanjian kredit pada PT BPR?; 3) Bagaimana hakim dalam menentukan putusan atas perkara wanprestasi tersebut yang telah terbukti dan bagaimana akibat hukum setelah putusan hakim tersebut diterima oleh para pihak yang berperkara?.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode normatif. Metode normatif mengkaji hukum berdasarkan kaidah hukum dan asas dalam hukum dalam proses penyelesaian perkara wanprestasi terhadap pelaksanaan perjanjian kredit pada PT BPR. Bahan hukum primeryakni KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan tentang pinjaman kredit. Bahan hukum sekunderyaitu sumber data yang tidak langsung memberikan keterangan bersifat melengkapi sumber data primer. Dalam penelitian ini sumber data sekunder. Metode analisis data secara kualitatif yaitu dengan menganalisa data yang terdiri dari, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, yurisprudensi yang berkaitan dengan perkara wanprestasi dalam perjanjian kredit, yang kemudian akan dipadukan dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berupa pendapat responden, kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data yang dianalisa secara kualitatif sehingga dapat dicari pemecahan yang terakhir diambil kesimpulan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Proses Pemeriksaan Perkara Dalam Perkara Wanprestasi Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada PT BPR

Berdasarkan keterangan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, proses pemeriksaan perkara wanprestasi terhadap pelaksanaan perjanjian kredit pada PT. BPR dimulai dari melakukan pengecekan terhadap identitas Penggugat kepada Pengadilan Negeri Karanganyar yang memiliki yurisdiksi (kompetensi absolut dan relatif) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara (sengketa) yang diajukan dan sekaligus mendaftarkan surat kuasa khusus, apabila dalam perkara tersebut Penggugat mewakilkan kepada orang lain, baik kuasa insidentil ataupun kuasa yang diberikan oleh Advokat, dengan membayar biaya panjar perkara dan biaya pendaftaran surat kuasa. Penggugat atau Kuasa Hukumnya menerima SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dan kwitansi pembayaran panjar perkara dari Bendahara Pengadilan Negeri Karanganyar. Penggugat atau Kuasa Hukumnya menerima kembali 1 (satu) bendel surat gugatan yang telah dibubuhi Nomor Register Perkara yang telah diparaf oleh Panitera Kepala atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.

b. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pembuktian Pada Perkara Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada PT BPR

Berdasarkan pada putusan Pengadilan negeri Karanganyar Nomor 16/PDT.G/2012/PN.Kra, mengenai proses penyelesaian perkara wanprestasi antara debitur dan kreditur, dalam sidang pemeriksaan Majelis Hakim telah menentukan pembuktian sebagai berikut :

Hakim memeriksa dan mengadili alat bukti yang di ajukan Penggugat

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis yang di daftarkan pada kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan mengajukan dalil-dalil gugatan yang intinya sebagai berikut :

Bahwa penggugat dan tergugat terikat hubungan hukum perjanjian kredit yang di tuangkan dalam surat perjanjian kredit, tergugat selaku debitur mendapatkan fasilitas kredit (pinjaman) sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam surat perjanjian kredit (SPK) Nomor: 7720/SPK/XI/2010. Tetapi Tergugat hanya membayar 3X saja. Oleh karena itu penggugat memberikan toleransi kepada Tergugat dengan meminta jasa konsultasi hukum untuk upaya pendekatan serta penagihan telah dilakukan oleh Penggugat agar Tergugat segera melunasi kewajibannya, baik dengan cara memberikan teguran (somasi) maupun mendatangi (surat peringatan) hingga 3X berturut-

turut dan dengan mendatangi secara langsung, namun upaya yang dilakukan mendapat tanggapan yang positif dari Tergugat, oleh karena itu Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi).

Penggugat diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti baik berupa alat bukti tertulis maupun saksi-saksi, sebagai berikut :

1) Jawaban Tergugat

Karena dengan tidak hadirnya pihak Tergugat di persidangan maka majelis hakim menjatuhkan putusan verstek dan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat. Hal ini berdasarkan HIR Pasal 125:

Ayat (1); Jika Tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan. (RV. 78; IR. 102, 122 d,t.)

Pada saat sebelum proses persidangan dimulai maka Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar memanggil pihak Tergugat selama 3 X pada tanggal 1 Maret 2012, tanggal 15 maret 2012, tanggal 29 September 2012 yang mana pemanggilan Tergugat melalui surat resmi pengadilan dan surat pemanggilan tersebut ditanda tangani oleh pihak Tergugat, akan tetapi saat proses persidangan dimulai, pihak Tergugat juga tidak hadir tanpa disertai alasan yang sah maupun tanpa perwakilannya. Berdasarkan hal tersebut hakim menjatuhkan putusan verstek atas perkara yang diajukan oleh Penggugat.

c. Hakim Dalam Menentukan Putusan Atas Perkara Wanprestasi Tersebut Yang Telah Terbukti Dan Bagaimana Akibat Hukum Setelah Putusan Hakim Tersebut Diterima Oleh Para Pihak

Berdasarkan pada hasil kesimpulan pembuktian tersebut diatas yang dijadikan pedoman utama oleh hakim dalam merumuskan pertimbangan hukumnya sebelum menjatuhkan putusan, dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 16/PDT.G/2012/PN.Kra mengenai proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian kredit. Dimana majelis hakim telah menjatuhkan putusan yang didasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Tergugat telah wanprestasi/atau tidak menepati janji yaitu tidak melunasi hutangnya sebagaimana yang telah dituangkan dalam perjanjian kredit tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat.

Oleh karena Tergugat wanprestasi/cidera janji atau tidak melunasi hutangnya pada Penggugat maka Penggugat memohon pada pengadilan agar tanah yang bersertifikat yang dijadikan jaminan tersebut untuk dijual lelang didepan umum guna melunasi hutangnya Tergugat kepada Penggugat.

Bahwa setelah majelis mendengarkan keterangan saksi-saksi dan melihat bukti surat ternyata dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Tergugat pernah mendapatkan kredit dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000 dan telah dibayar sebagian melalui angsuran sehingga sisa hutang yang belum diangsur atau belum dilunasi sebesar Rp 138.250.000. Oleh karena itu Tergugat telah diperingatkan atau ditegur oleh Penggugat agar segera melunasi hutangnya sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanjikan tersebut akan tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukan atau tidak peduli terhadap apa yang telah diperjanjikan tersebut.

Dengan melihat alat-alat bukti yang diajukan Penggugat didepan persidangan yaitu bukti P.1 sampai dengan P.5 dan keterangan dua orang saksi yang menyatakan bahwa yang menjadi posita gugatan atau yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah benar adanya seperti dalam surat Gugatan tersebut.

Atas kelalaian Tergugat tersebut menurut hukum adalah merupakan wanprestasi atau cidera janji maka sisa hutang + bunga + denda yang harus dibayar oleh Tergugat menurut perjanjian yang telah disepakati tersebut adalah Rp 125.000.000,-

Bahwa terhadap Surat Pejanjian Kredit yang telah disepakati tersebut apakah dapat dibenarkan menurut hukum yaitu syarat sahnya suatu perjanjian dan apakah sudah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Untuk dapat dikategorikan telah terjadi suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, maka haruslah memenuhi salah satu syarat, yaitu :

- 1) Sama sekali tidak memenuhi seluruh atau semua prestasi/kewajibannya
- 2) Hanya memenuhi sebagian prestasi/kewajibannya
- 3) Terlambat memenuhi prestasi/kewajibannya
- 4) Memenuhi prestasinya/kewajibannya, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau salah berprestasi.

Tergugat adalah sebagai pihak yang lalai memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang atau sebagai orang yang telah melakukan wanprestasi maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini termasuk biaya lelang adalah menjadi tanggung jawab para Tergugat.

Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Maka dalam perkara ini Majelis Hakim pemeriksa perkara telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir; mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek; menyatakan surat perjanjian kredit No. 7720/SPK/XI/2010 adalah sah menurut hukum; menyatakan bahwa sisa hutang + bunga +denda yang harus dibayar para Tergugat Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah); menghukum para Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah); menetapkan bahwa apabila para Tergugat tidak mampu untuk membayar hutangnya sebesar Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) maka tanah yang menjadi jaminan kredit tersebut tercatat dalam sertifikat atas nama Ferryantho Saad, SHM Nomor 0420 seluas 610 M2 yang terletak di perumahan Madya Kav B2 Pusung Utama Sinduharjo Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, untuk dijual lelang didepan umum dan hasil lelang diserahkan kepada Penggugat sebesar Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah); menetapkan bahwa biaya lelang dan biaya perkara dibebankan kepada para Tergugat; menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp.549.000 (lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah); menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Berdasarkan hasil wawancara salah satu hakim di Pengadilan Karanganyar makayakni T.benny eko supriadi, SH, yang mengatakan bahwa akibat hukum yang di terima oleh tergugat adalah yakni harus menyerahkan jaminan berupa sertifikat yang menjadi jaminan dalam perjanjian kredit, kemudian Tergugat harus membayar hutang dan denda kepada penggugat karena telah wanprestasi, serta menyerahkan jaminan kredit dari tergugat kepada penggugat melalui kantor pejabat lelang negara.

4. KESIMPULAN

a. Proses pemeriksaan perkara wanprestasi terhadap pelaksanaan perjanjian kredit pada PT BPR

Pemeriksaan perkara wanprestasi perjanjian kredit pada PT. BPR dimulai dari melakukan pengecekan terhadap identitas Penggugat kepada Pengadilan Negeri

Karanganyar yang memiliki yurisdiksi (kompetensi absolut dan relatif) diantaranya dengan melakukan pemeriksaan alat bukti berupa dokumen dan keterangan saksi yang merupakan pegawai internal PT. BPR Arta Mas Surakarta.

Setelah melakukan pemeriksaan perkara maka dilanjutkan dengan memeriksa dan mengadili alat bukti oleh hakim yang di ajukan Penggugat. Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis yang di daftarkan pada kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan mengajukan dalil-dalil gugatan yang intinya Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajiban atau prestasi yang sudah disepakati dalam perjanjian pinjaman kredit senilai Rp 138.250.000 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam pembuktian ini pihak Penggugat menghadirkan saksi bagian administasi dan marketing untuk menguatkan gugatan yang diajukan kepada Tergugat.

Dalam perkara ini pihak Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut dan sah oleh Pengadilan Negeri Karanganyar melalui Panitera secara tertulis atau melalui surat. Pihak Tergugat hanya memberikan tanda tangan saja, akan tetapi saat proses persidangan selama 3 x pihak Tergugat juga tidak hadir dan tidak ada perwakilan yang ditunjuk serta tanpa disertai alasan yang tepat. Maka Hakim yang menangani perkara wanprestasi perjanjian pinjaman kredit ini langsung menjatuhkan putusan Verstek sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 125 HIR Ayat (1) (2), (93), (4) yang mana mengabulkan sebagian gugatan yang dijukan Penggugat.

b. Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian pada perkara wanprestasi dalam perjanjian kredit pada PT BPR

Dimana majelis hakim telah menjatuhkan putusan yang didasarkan pertimbangan-pertimbangan melihat alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa dokumen yang mencakup Surat Perjanjian Kredit No.7720/SPK/XI/2010 tertanggal 27 November 2010, sertifikat hak milik sebuah tanah yang menjadi jaminan Tergugat dalam melakukan pinjaman, surat pemanggilan dari pihak bank selama 3 x dan keterangan saksi dari pihak bank untuk memperkuat gugatan yang diajukan, selain itu ketidakhadiran pihak Tergugat selama 3 x di persidangan memperkuat gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

c. Hakim dalam menentukan putusan atas perkara wanprestasi tersebut yang telah terbukti dan bagaimana akibat hukum setelah putusan hakim tersebut diterima oleh para pihak yang berperkara

Dari pembuktian ini maka hakim memutuskan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak

dapat dibantah oleh Tergugat dalam persidangan dikarenakan pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan oleh hakim sebanyak 3 x tanpa disertai alasan. Tanpa kehadiran Tergugat pada persidangan sebanyak 3 x maka, hakim menjatuhkan putusan verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 125 HIR Ayat (1) Jika Tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan. (RV. 78; IR. 102, 122 d,t.).

Tergugat telah wanprestasi/atau tidak menepati janji yaitu tidak melunasi hutangnya sebagaimana yang telah dituangkan dalam perjanjian kredit tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena Tergugat wanprestasi/cidera janji atau tidak melunasi hutangnya pada Penggugat maka Penggugat memohon pada pengadilan agar tanah yang bersertifikat yang dijadikan jaminan tersebut untuk dijual lelang didepan umum guna melunasi hutangnya Tergugat kepada Penggugat.

Akibat hukum yang di terima oleh Tergugat dalam perkara wanprestasi ini adalah yakni harus menyerahkan jaminan berupa sertifikat yang menjadi jaminan dalam perjanjian kredit, kemudian Tergugat harus membayar hutang dan denda kepada Penggugat karena telah wanprestasi sejumlah Rp 138.250.000, serta menyerahkan jaminan kredit dari tergugat kepada penggugat melalui kantor pejabat lelang negara.

Putusan Hakim dalam perkara wanprestasi perjanjian kredit ini akan diberikan kepada pihak Tergugat. Pihak Tergugat akan diberikan tenggat waktu selama 14 hari setelah putusan dijatuhkan untuk melakukan upaya hukum atau banding. Jika selama 14 hari setelah putusan dijatuhkan pihak Tergugat tidak juga melakukan upy hukum atau banding, maka secara otomatis pihak Pengadilan Negeri Karanganyar akan melakukan eksekusi dan pihak Tergugat harus mematuhi putusan tersebut

Persantunan

Saya mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan karya ilmiah ini saya persembahkan kepada *pertama*, ayah dan ibu saya tercinta dan selalu memberikan motivasi kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan karya ilmiah ini. *Kedua*, kakak kandung saya tersayang yang selalu memberikan semangat serta dorongannya. *Ketiga*, pembimbing skripsi saya yang sangat saya hormati yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama penulisan karya ilmiah ini. *Keempat*, dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah mendidik saya selama ini selama

perkuliahan. *Kelima*, sahabat dan teman-teman yang berperan penting yang telah memberikan semangat dan motivasinya.

DAFTAR PUSTAKA

H. Salim, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Sukwiaty, et. al., 2007, *Ekonomi 3*, Edisi 2. Jilid 3, Jakarta, Yudhistira

Salim, H.S, 2005, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta.

Djumhana Muhamad, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapatan yang tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 04 Agustus 2017

Penulis



Adytia Dio Nur Kusuma

NIM C100130271